



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah  
**TARGET TOL YOGYA-SOLO: Pekerja meratakan tanah di proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Kalasan, Sleman, Kamis (22/2/2024). Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo ditargetkan akan tersambung dengan Tol Yogya-Bawen pada akhir tahun 2024.**

### 3 Strategi Percepat Penurunan Kemiskinan

**JAKARTA (KR)** - Meskipun masih ada berbagai tantangan, Pemerintah terus berupaya mewujudkan pencapaian target penurunan kemiskinan tahun 2024. Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggelar Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2). Wapres mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Di antaranya melalui perluasan bantuan sosial, inovasi program peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa pandemi Covid-19, serta mempertahankan angka kemiskinan agar tetap di bawah 10 persen. Dalam rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ini, Wapres menegaskan tiga strategi pokok untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024. "Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terus memperbaiki pen sasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima Program Bantuan Sosial maupun Jaminan Sosial, dengan merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan," perintahnya. Yang kedua, kata Wapres, terus lakukan intervensi khusus untuk Program Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan maupun wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin

tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. "Ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti Bantuan Beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan," instruksinya. Selain ketiga strategi tersebut, Wapres mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program, serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga. "Untuk itu, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja," tuturnya. **(Ati)-f**

Sambungan hal 1

### Menkeu:

Fitri, lanjut Sri Mulyani, kenaikan harga pangan lain seperti bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam juga turut perlu diwaspadai. Hingga 21 Februari 2024, kenaikan harga pangan juga dialami bawang putih yang naik 1,9 persen. Cabai merah tercatat mengalami kenaikan harga 17,0 persen, daging ayam naik 2,2 persen, dan telur ayam juga naik 3,9 persen. Untuk itu, saat ini Pemerintah terus berupaya melakukan stabilisasi harga pangan menyambut hari besar keagamaan ke depan. "Tentu ini menjadi tantangan menjelang Idul Fitri, juga puasa Ramadan, maka volatile food

harus bisa segera distabilkan. Agar headline inflasi kita masih bisa terjaga rendah pada saat inflasi dunia dan negara maju juga mengalami penurunan (inflasi)," kata Menkeu. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada masyarakat terkait penyebab dampak kenaikan beras di sejumlah pasar dalam negeri karena adanya perubahan iklim hingga sebagian negara lain juga mengalami hal serupa. "Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara ki-

ta, tetapi juga negara lain mengalami hal yang sama," ungkap Presiden. Kepala Negara menekankan, pemberian bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap pertama kepada 1.000 warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Maros ini juga merupakan bentuk perhatian serius Pemerintah kepada masyarakat. Dengan pemberian beras 10 kg/bulan selama enam bulan ke depan kepada KPM, diharapkan juga mengurangi beban masyarakat di tengah kenaikan harga beras di pasaran dampak dari El Nino serta perubahan iklim. **(Ant/San)-d**

Sambungan hal 1

### Sembilan

yang tinggal di DIY, 74 orang di antaranya mengenyam bangku kuliah. Tapi, APK PT ini dapat mengecoh. Proporsi ini tidak hanya memasukkan warga asli DIY. Untuk simulasi, kita anggap angka 9% sebagai data 2022. Lulusan SMA di DIY pada tahun tersebut sekitar 53.000. Artinya, kurang dari 4.800 yang kuliah, dan sisanya, lebih dari 48.000 tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka memilih bekerja, berwirausaha, atau aktivitas lain. Kita bisa bertanya: Apakah mereka tidak melanjutkan kuliah itu pilihan merdeka atau dipaksa keadaan? Tidak ada informasi spesifik soal ini. Meski patut diduga, berkaitan masalah ekonomi. Karenanya, penulis sangat bersyukur, ketika Selasa (20/2) Dinas Dikpora DIY meluncurkan beasiswa berkelanjutan untuk pemuda DIY. Memang cacahnya masih kecil, tetapi ini merupakan langkah konkret yang perlu diapresiasi. Beasiswa kuliah bisa diakses pemuda berusia 18-24 tahun. Besaran beasiswa adalah Rp 10 ju-

ta per tahun. Pada 2024 ini tersedia 150 paket. Cacah paket ini bertambah jika inisiatif serupa yang dilakukan kabupaten dimasukkan. Kita bisa bayangkan dampak jangka panjang jika masalah ini tidak diatasi. Termasuk di antaranya adalah kemungkinan warga asli terpinggirkan dalam kompetisi untuk mendapatkan beragama akses, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Salah satu dampaknya lanjutannya adalah ketimpangan sosial antara warga asli dan warga pendatang. Ini menakutkan. Jalan keluar permanen perlu dicari bersama-sama. Program intervensi harus menjadi gerakan kolektif. Perguruan tinggi negeri dan swasta yang mampu dapat terlibat. UUI, misalnya, mulai 2024, menembangkan skema beasiswa afirmasi pembebasan uang kuliah untuk warga asli yang tidak mampu. Untuk sementara tersedia 29 paket, satu orang per program studi jenjang diploma dan sarjana. Maka perta-

nyaan banyak pimpinan PTS yang sering dititipkan kepada penulis perlu juga disampaikan: *Apakah mungkin sebagian dana keistimewaan dialokasikan untuk memperbesar cacah paket beasiswa?* Mari kita simulasikan untuk 1.000 paket per tahun menggunakan standar Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Besar uang kuliah menengah per semester Rp 4 juta. Ini artinya perguruan tinggi tetap harus berkontribusi. Bantuan biaya hidup kluster terendah Rp 800.000 per bulan. Untuk 1.000 paket, pada tahun pertama dibutuhkan Rp 17,60 miliar. Pada tahun keempat dan seterusnya Rp 70,4 miliar untuk 4.000 penerima beasiswa aktif. Bandingkan dengan dana keistimewaan yang sebesar Rp 1,42 triliun. Sebanyak Rp 1,07 triliun (75,37%) dialokasikan untuk bidang kebudayaan. Kalau pendidikan tinggi dianggap sebagai bagian penting dan bidang ini, maka sudah sangat klop. **(Penyul) adalah Rektor UUI dan Ketua Aptisi DIY)-f**

Sambungan hal 1

### Sultan

Sambungan hal 1

tanam tahun lalu mundur. Dari yang harusnya panen besar terjadi pada Maret besok, tapi saat ini hanya panen kecil. Adanya peralihan musim dan kondisi cuaca yang tidak menentu turut menjadi salah satu faktor penyebabnya," ungkapnya. Sultan menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, Pemda DIY akan memastikan ketersediaan stok di pasaran tetap stabil. Dengan begitu fluktuasi harga diharapkan tidak terlalu memberatkan ma-

syarakat. Selain itu pasokan komoditas bahan pokok ke wilayah setempat juga harus dipastikan terjaga agar tidak berpengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. "Dalam kondisi sekarang yang terpenting bagaimana menjaga stabilitas itu bisa dilakukan. Artinya pasokan itu harus jelas. Kalau tidak nanti inflasi, akan terjadi fluktuatif makin tinggi bukan makin turun," tandasnya. **(Ria)-f**

### ICW

Sambungan hal 1

Nomor 1 tahun 2019, KPU sebagai badan publik wajib memberikan respons paling lambat tiga hari kerja. Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS). "Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunaannya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," katanya. Betty mengatakan, pengunggahan data

yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat. Pasalnya, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap. Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atau optical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR). Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan sebagai manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap. **(Ant/Has)-d**

### Bawaslu

Sambungan hal 1

orasi ketidakpuasan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai banyak diwarnai kecurangan. "Bawaslu sebagai instrumen demokrasi dinilai gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Bawaslu tak ubahnya sekadar tukang stempel kepentingan rezim penguasa yang telah mengutur sedemikian rupa Pemilu terseleenggara sesuai selera," tandas Koordinator Lapangan Arya Yuda. Disebutkan, berbagai preseden buruk yang terjadi dalam Pemilu dinilai publik merupakan buntut dari malpraktik kekuasaan rezim Joko Widodo sejak meletus skandal keputusan Mahkamah Konstitusi hingga KPU yang memberikan karpet merah kepada sang putra Presiden agar bisa menjadi salah satu kontestan Pemilu Presiden. "Kerupuk melempem seperti barang yang sudah tidak berguna lagi,

kami berikan ke Bawaslu sebagai simbol sikap yang lemah, permisif terhadap KPU," kata Arya. Sementara Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib yang menemui massa menyatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi masukan. "Kami dengar dan tindaklanjuti, menjadi vitamin bagi kami untuk memperbaiki diri untuk terus mengawal Pemilu di DIY," katanya. Najib menjelaskan di wilayah DIY, Bawaslu pada awal pekan ini telah merekomendasikan pada KPU DIY untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) serta pemungutan suara lanjutan (PSL) di 17 titik Tempat Pemungutan Suara atau TPS. "Penyebab PSU di antaranya karena ada pemilih dari luar daerah ikut mencoblos padahal tidak tercatat dalam daftar pemilih," ungkapnya. **(Vin)-d**

### Panji

Sambungan hal 1

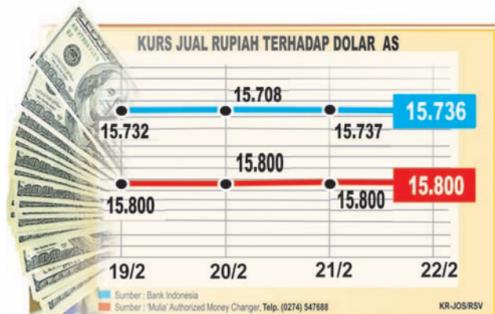
Kuasa Hukum Panji Gumilang mengaku sedang menyiapkan pembelaan atau pledoi untuk pelaksanaan sidang lanjutan di PN Indramayu pekan depan. "Tadi sudah jelas. Nanti kami memberikan tanggapan yang dijelaskan di pledoi pada satu pekan ke depan," katanya. Sementara Juru Bicara PN Indramayu Yanto Arianto memastikan pelaksanaan sidang kali ini berjalan lancar dan tidak mengalami kendala apapun. Sehingga JPU dapat menyampaikan tuntutan terhadap Panji Gumilang yang menjadi terdakwa kasus penodaan agama. Yanto menambahkan sidang lanjutan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, dengan agenda pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa. "Sidang yang akan datang pembelaan dari penasihat hukum terdakwa," ujarnya. **(Ant/Has)-d**

### PSS

Sambungan hal 1

dan merangsek naik ke posisi 12. Sementara Bhayangkara FC masih terjerebbed di posisi buncit klasemen dengan 15 poin. "Bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting karena kami datang dengan hasilimbang di kandang. Jadi ini tiga poin yang sangat penting," kata Risto Vidakovic, Pelatih PSS usai laga. Menurutny, pemain sangat serius dalam pertandingan dan ia sangat senang melihat hal tersebut. Pemain melakan pekerjaan mereka dengan sempurna terutama ketika bertahan, dengan bola. "Di awal sedikit sulit untuk kami bermain karena percaya diri yang belum tinggi tapi dalam beberapa menit kami mencapai titik terbaik dan saya pikir kami layak menang hari ini," kata Risto. Ia pun mengapresiasi Ajak Riak yang mencetak gol perdananya bagi PSS. Penantian panjangnya untuk mencetak

gol, akhirnya mendapatkan titik temu. "Gol dari Ajak bagi saya, kami semua menselebrasi itu karena gol itu sangat penting untuk kita," tambah Risto. **(Yud)-f**



Prakiraan Cuaca		Jumat, 23 Februari 2024			
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul				22-30	65-95
Sleman				22-29	65-95
Wates				22-29	65-95
Wonosari				22-30	65-95
Yogyakarta				22-30	65-95

**Muhammad Zuhdan, SIP MA**  
Kaprosdi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

**PERHITUNGAN** real count KPU RI belum selesai 100 %, tetapi hasil quick count hampir sebagian besar lembaga survei yang terdaftar resmi KPU RI menunjukan bahwa Pasangan Calon (Paslon) nomor 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemenang Pilpres 2024 dengan nilai perolehan suara diatas 50%+1, dan kemungkinan besar Pilpres 2024 hanya

## Siapa Saja Parpol yang Akan Berkoalisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran?

satu putaran. Sisi lain hiruk pikuk, pasca Pilpres belum selesai terkait rencana gugatan Paslon 01 dan Paslon 03 ke MK ataupun usulan penggunaan hak interpelasi di Senayan untuk mengevaluasi proses pemilu 2024. Terlepas hiruk pikuk tersebut, publik yang sudah banyak merasa legowo menerima hasil Pilpres versi quick count tersebut juga penasaran atas koalisi pemerintahan ke depan. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem yang disusul pelantikan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN kemarin 21 Februari 2024, menandakan mulai terjadinya lobbying politik antara Jokowi dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Posisi Surya Paloh yang menjelang Pilpres selaku pencetus awal dan pemimpin Koalisi Perubahan yang mengusung paslon 01 Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai capres 2024 nampaknya mulai mencari genk politik yang simbiosis mutual pasca Pilpres ini, mengingat suara Nasdem justru lebih rendah dari PKB padahal

Nasdem yang me-leading pemenangan AMIN. PKB dan PKS belum ada tanda-tanda ketua umumnya akan saling bertemu dengan Jokowi, dan belum memberikan lampu hijau atas rencana Prabowo-Gibran yang mau silaturahmi ke mereka pasca Pilpres ini. PKB dan PKS masih meyakini bahwa Paslon 01 belum kalah Pilpres sebelum ada pengumuman resmi dari KPU RI dan keduanya masih konsentrasi atas gugatan atas dugaan kecurangan pemilu yang terjadi. Hal yang sama juga terlihat di PDI-P mereka juga masih fokus pada upaya gugatan hasil Pilpres yang membuat paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD nilai perolehan suaranya keok rendah sekali di luar prediksi internal times mereka sebelumnya. Walaupun sebelumnya, melalui Sekjen-nya Hastu Kritiyanto, bahwa PDI-P kemungkinan akan mengambil jalan oposisi ke depan, dan oposisinya lebih memilih ke oposisi ke program, bukan oposisi ideologis atau oposisi pemerintahan. Soal rencana pertemuan

antara Jokowi, Megawati Soekarno Putri, dan Sri Sultan HB X yang ramai santer terdengar di banyak media menjadi salah satu tanda menarik rekonsiliasi antara Jokowi dan Megawati yang mana Sultan HB X sebagai juru tengahnya. Parpol-parpol yang kemarin tergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo-Gibran, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB tentu akan menjadi motor utama koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, PPP dan mungkin beberapa parpol lain masih belum menyatakan sikap akan masuk ke koalisi pemerintahan. Prabowo-Gibran sampai hari ini, walaupun tanda-tanda beberapa partai tersebut sudah main lirik dengan Jokowi selaku king maker Pilpres 2024 dan regime maker ke depan. Selaku king maker dan regime maker, Jokowi tidak akan tinggal diam apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini adalah warisan politik dia. Politik akomodasi mungkin akan ditempuh oleh Jokowi, yang mana dia menyatakan diri siap menjadi

jembatan antar ketum-ketum partai politik untuk bertemu pasca Pilpres 2024 ini. Selain itu, jurus politik hukum bisa jadi alat politik lain untuk memperluak ketum-ketum parpol agar mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kasus-kasus korupsi lama yang menyangkut tokoh-tokoh partai yang belum menyatakan diri akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran kemungkinan akan diungkit-ungkit lagi, sebagai alat negosiasi. Buat penulis sendiri, membaca peta koalisi pemilu ataupun koalisi pemerintahan di Indonesia cukup membingungkan karena tidak seideal dengan teori politik yang ada. Idealnya koalisi kemenangan pemilu didasarkan pada persamaan ideologi dan platform politik, tapi di pilpres 2024 kemarin nampaknya campur baur dasar koalisinya baik di Paslon 01, Paslon 02, dan Paslon 03. Setelah mereka menang atau kalah, koalisi kemenangan pemilu tersebut bisa rembugan lagi ketum partainya untuk membentuk koalisi pemerintahan, bisa lanjut dan bisa juga pindah. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia,

**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**  
Creative Economy Park

karakter koalisi pemerintahannya harusnya tidak sekaku dalam sistem pemerintahan parlementer yang mana butuh dukungan kuat koalisi partai-partai di parlemen untuk mendukung kebijakan eksekutif. Sedangkan dalam koalisi pemerintahan ke depan, rasa koalisinya juga koalisi nano-nano karena dasarnya juga tidak jelas, antara pragmatisme jabatan dan keselamatan atas kasus-kasus hukum masa lalu. Terlepas dari prediksi tersebut, penulis yakin kalau sebagian besar partai yang belum berkoalisi dengan rezim Prabowo-Gibran mereka akan diam-diam merapat ke pemerintahan, nunggu hiruk pikuk pilpres reda dan publik mulai lupa alias tidak menggubris Pilpres lagi. Hal ini sesuai dengan karakter umum tipologi kepartaian kita, sebagai rent seaker party/ business party alias partai pencari untung bukan partai oposan revolusioner yang siap tahan lapar di luar pemerintahan. \*\*\*